



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711,
Telp/Fax. (0274) 367348 Laman : www.pn-bantul.go.id,
Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

**Pengumuman Seleksi
Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IA Tahun Anggaran 2026
Nomor: 418/SEK.03.W13.U5/PL.1.1.5/XII/2025**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 94/KPN/W13-U5/SK.HM2.1.3/XII/2025, tanggal 1 Desember 2025, tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Penyedia Lembaga Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IA Tahun Anggaran 2026, Panitia Seleksi akan menyelenggarakan Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Bantul dan akan mengambil 1 (satu) orang pemenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama pekerjaan	: Layanan Pos Bantuan Hukum
Lingkup pekerjaan	: Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum
Lokasi pekerjaan	: Pengadilan Negeri Bantul
	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul
Nilai Total HPS	: Rp 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
Sumber Pendanaan	:DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2026, dengan Nomor SP DIPA-005.03.2.400173/2026

2. Persyaratan

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. Memiliki Akta Pendirian Lembaga;
- d. Memiliki struktur kepengurusan lembaga;
- e. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas dan disertai dengan foto kantor;
- f. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul;
- g. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara/beracara di Pengadilan atau memahami mekanisme Layanan Posbakum di Pengadilan Negeri;

- h. Memiliki minimal 2 (dua) orang advokat;
- i. Memiliki staf yang nantinya bertugas di ruangan Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah;
- j. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Bantul, harus telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah;
- k. Mempunyai sertifikat Akreditasi;
- l. Melampirkan persyaratan tambahan berupa:
 - 1) Rekening LBH
 - 2) Sertifikat advokat anak
 - 3) Sertifikat advokat ramah difabel
 - 4) Sertifikat advokat perlindungan perempuan
 - 5) Sertifikat/Pelatihan Pelayanan Masyarakat (Penyusunan gugatan/ permohonan/ dokumen hukum/ E-Court/ E-Berpadu)
 - 6) Sertifikat/Pelatihan bantuan hukum probono
 - 7) Sertifikat penegak hukum lex specialis/ KSDA/ Perikanan/ Kelautan
- m. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: laptop atau komputer, printer dan kertas untuk pembuatan dokumen;
- n. Tidak masuk dalam daftar hitam LKPP;
- o. Telah terdaftar dalam **Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)**;

3. Tahapan Seleksi

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Kegiatan
1.	Pengumuman dan Pemasukan Dokumen Kualifikasi	12 Desember 2025 s.d. 16 Desember 2025
2.	Pemeriksaan dokumen Kualifikasi	16 Desember 2025
3.	Pengumuman nama lembaga yang lolos syarat administrasi	17 Desember 2025
4.	Tes tertulis dan wawancara	18 Desember 2025
5.	Pengumuman pemenang	19 Desember 2025

Kepada Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum yang berminat dapat memasukkan dokumen pendaftaran yang diantar langsung dan ditujukan kepada “Panitia Seleksi Calon Penyedia Lembaga Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IA Tahun Anggaran 2026” Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul, dengan melampirkan dokumen yang ada pada tanggal tersebut di atas pada hari kerja Pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB.

Bantul, 12 Desember 2025

Ttd

Panitia Seleksi